



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 188.341/MoU.11-Huk/2019
NOMOR : 164/10/DPRD/VIII/2019
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2019

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TA 2019

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Substansi KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah

sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tahun berjalan dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan, serta faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran.

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; Adanya kegiatan lanjutan yang menjadi kewajiban Pemerintah

Provinsi Banten dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2019.

- d. keadaan darurat;
- e. keadaan luar biasa, yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut, dituangkan ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD sebagai landasan dalam pengalokasian PPAS perubahan APBD yang menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.

Adapun asumsi-asumsi yang mendasari terjadinya perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah target sebelum perubahan sebesar Rp11.831.983.759.800,00 berkurang 1,27% atau sebesar Rp(161.772.221.213,00) sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp11.670.211.538.587,00.
2. Belanja Daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp12.154.531.396.800,00 meningkat sebesar 3,82% atau Rp464.636.284.675,00 sehingga Belanja Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp12.619.167.681.475,00.
3. Pembiayaan Daerah merupakan pos yang dicadangkan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan Daerah

sebelum perubahan sebesar Rp322.547.637.000,00 meningkat 194,21% atau sebesar Rp464.636.284.675,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp12.619.167.681.475,00,00.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, yang meliputi: penyesuaian standar satuan harga, perubahan asumsi ekonomi makro yang telah direncanakan terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan dan pembayaran kewajiban kepada pihak ketigan maka perlu dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan secara komprehensif guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodasikan dalam APBD

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, dengan tetap memperhatikan aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TA 2019

KUPA TA 2019 disusun sebagai landasan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019, yang menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019. Perubahan kebijakan penganggaran dalam KUPA merupakan respon terhadap dinamika permasalahan yang timbul di daerah dengan memperhatikan prioritas nasional, yang perlu mendapat penanganan secara cepat.

Dengan menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, asumsi belanja daerah dan asumsi pembiayaan pada Perubahan APBD TA 2019 serta melalui penajaman prioritas kegiatan maupun pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, pada program pembangunan diharapkan dapat dipercepat.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TA 2019

Landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Renja Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 9);
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018);
27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut disajikan ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD. Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD TA 2019 disajikan penjelasan mengenai:

1. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
4. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2019 tentunay juga didasarkan pada isu-isu strategis daerah dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019:

1. Isu Strategis

- a. Mengurangnya Kesenjangan Wilayah Melalui Pembangunan Insfrastruktur
- b. Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Aksesibilitas Dan Mutu Pendidikan Dan Kesehatan
- c. Pengurangan Pengangguran Melalui Peningkatan Keterampilan
- d. Pengurangan Kemiskinan Melalui Jaminan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

2. Prioritas Pembangunan

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019, yaitu:

- a. Peningkatan Infrastruktur Wilayah
- b. Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Sosial
- c. Peningkatan Ekonomi Dan Kesempatan Berusaha
- d. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan

Selanjutnya berdasarkan isu strategis dan prioritas pembangunan Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan tema pembangunan:

“PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI”.

2.1.1. KEBIJAKAN KERANGKA EKONOMI MAKRO

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pencapaian indikator makro ekonomi, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Pembangunan Ekonomi Banten Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	6.00	6.20	6.40	6.70	7.00
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	8.45	8.20	7.95	7.68	7.40
Penurunan Kemiskinan (%)	Persen	5.13	5.00	4.87	4.74	4.60
Indeks Pembangunan Manusia						
Gini Ratio	Poin	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37

Sumber : RPJMD Banten 2017-2022

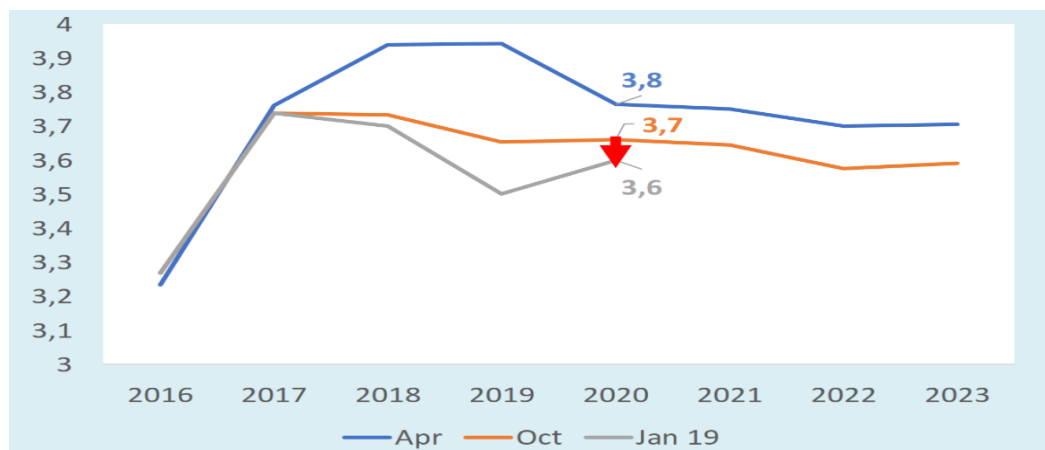
Pencapaian target makro ekonomi sebagaimana dimaksud di atas, tentunya tidak terlepas dari kondisi ekonomi global, Kawasan, Nasional, Regional, dan Provinsi Banten.

2.1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL

Berdasarkan estimasi *World Economic Outlook* (WEO) pada Oktober 2018, Ekspansi Ekonomi Global melemah, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 3.7 persen. Kinerja Ekonomi di beberapa negara melambat

terutama Eropa dan Asia. Ekonomi global diproyeksikan tumbuh melambat sebesar 3,5 persen pada 2019 dan 3,6 persen pada tahun 2020. Penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi negara maju diproyeksikan berada pada kisaran 1,7 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang pada kisaran 5,0 persen.

Gambar 2.1
Outlook Pertumbuhan Ekonomi Dunia



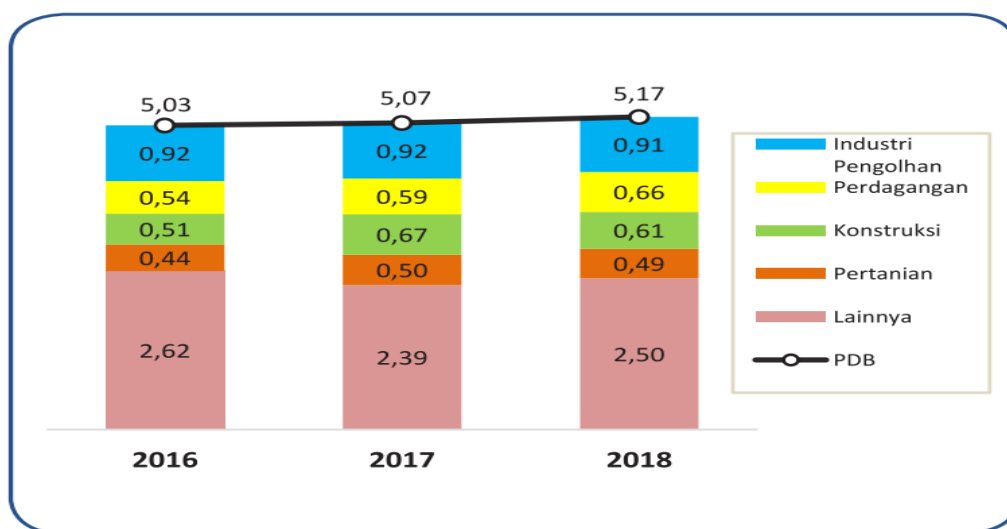
Sumber : WEO, IMF, Januari 2019

Perkembangan perekonomian dunia pada tahun 2020 diprediksi masih terpengaruh oleh ketegangan perdagangan Amerika-China. Pemeberlakuan standar emisi bahan bakar kendaraan oleh Jerman, kontraksi ekonomi Turki, kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dapat diperparah dengan tingginya utang publik dan swasta. Selain itu penarikan tanpa kesepakatan oleh Inggris dan Uni Eropa berdampak lebih besar dari yang diperkirakan China.

2.1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Perekonomian Indonesia digambarkan terus menguat dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,03 persen, tahun 2018 sebesar 5,07 persen, dan proyeksi tahun 2019 sebesar 5,17 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,91 persen, diikuti Perdagangan sebesar 0,66 persen, Konstruksi sebesar 0,61 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,50 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,36 persen, lapangan usaha lainnya sebesar 2,14 persen.

Gambar 2.2
Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2018 (persen)

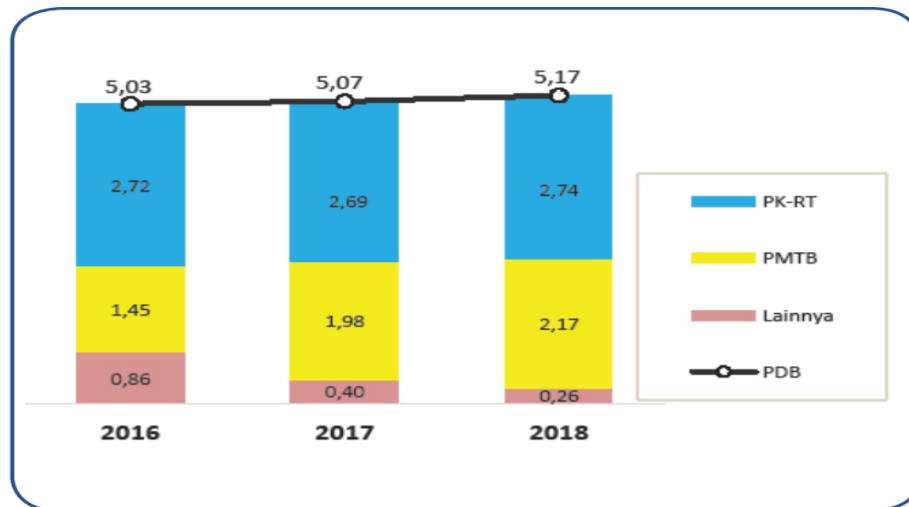


Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 mencapai 5,17 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen, yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi

Rumah Tangga (PK-RT), PK-LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor Barang dan Jasa. Sementara komponen Impor Barang dan Jasa mengalami peningkatan, namun komponen ini merupakan factor pengurang. Komponen PKLNPT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,08 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar 6,67 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,48 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen PK-RT sebesar 2,74 persen; yang diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 2,17 persen. Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen PK-RT sebesar 2,74 persen; yang diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 2,17 persen. Sementara sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,26.

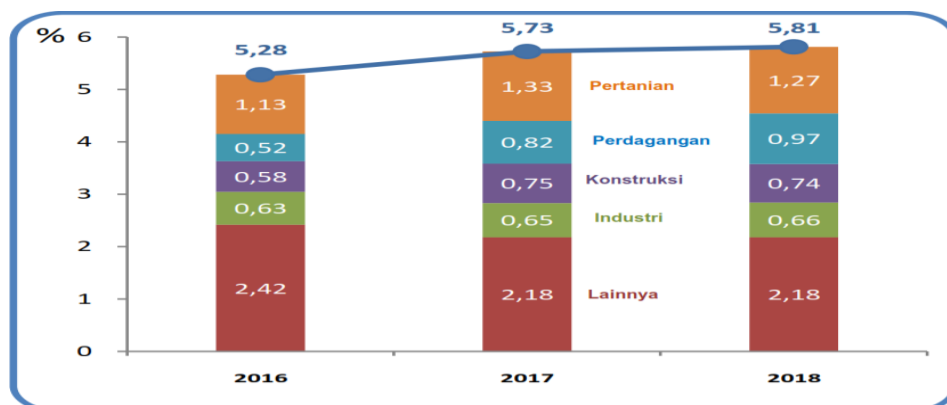
Gambar 2.3
Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran
Tahun 2016–2018 (persen)



2.1.4. PERTUMBUHAN EKONOMI BANTEN

Perekonomian Banten Tahun 2018 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 614,91 triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 48,46 juta. Ekonomi Banten tahun 2018 tumbuh 5,81 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,73 persen. Sementara pada triwulan I 2019 (YoY) tumbuh sebesar 5,42 persen.

Gambar 2.4
Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2016-2018

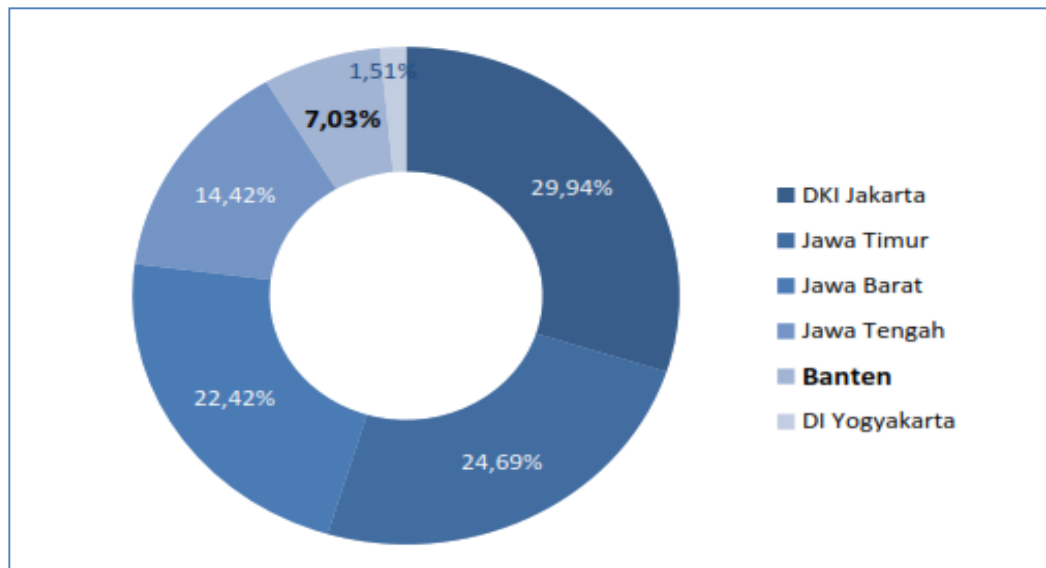


Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 7,88 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 7,14 persen. Ekonomi Banten triwulan IV-2018 (YoY) tumbuh 5,98 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,11 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,88 persen.

Ekonomi Banten triwulan I 2019 (YoY) tumbuh 5,42 persen melambat dibandingkan dengan capaian triwulan I 2018 sebesar 5,84 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,98 persen. Dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang tumbuh 7,38 persen

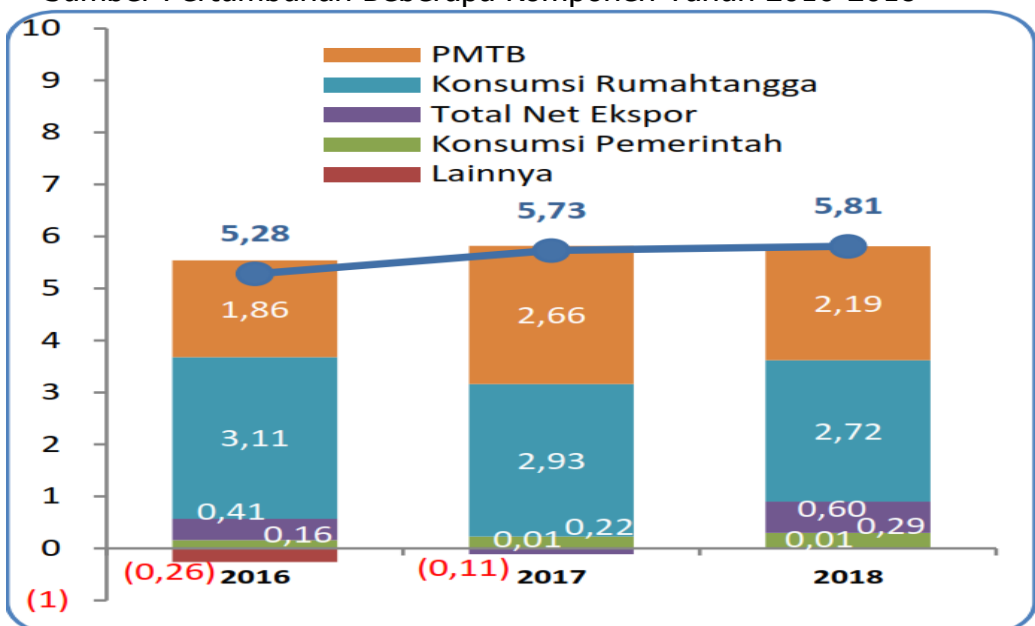
Struktur perekonomian Provinsi se-Jawa pada triwulan I-2019 masih didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Jawa sebesar 29,94 persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 24,69 persen, Provinsi Jawa Barat sebesar 22,42 persen. Sementara itu, Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 7,03 persen.

Gambar 2.5
Kontribusi PDRB se- Jawa TW I 2019



Sumber : BPS Provinsi Banten

Gambar 2.6
Sumber Pertumbuhan Beberapa Komponen Tahun 2016-2018



Sumber : BPS Provinsi Banten

Tabel 2.2
PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – TW I 2019 (Triliun Rp)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	Triwulan I-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan I-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah tangga	77,10	82,95	84,03	60,32	63,14	63,47
2. Konsumsi LNPR	0,67	0,73	0,74	0,52	0,55	0,56
3. Konsumsi Pemerintah	5,03	9,50	5,47	3,42	6,32	3,63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	45,60	51,85	51,29	32,40	35,68	34,55
5. Perubahan Inventori	0,08	0,01	0,01	0,08	0,01	0,01
6. Total Net Ekspor	18,50	14,83	18,29	8,41	5,58	8,63
6.a. Total Ekspor	106,04	115,69	109,84	81,60	86,38	82,76
6.b. Total Impor	87,54	100,86	91,55	73,18	80,80	74,13
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	146,97	159,87	159,83	105,15	111,28	110,86

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Banten Menurut
Pengeluaran
Tahun 2016-2018 (Persen)

Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah tangga	5,39	5,08	5,27	52,68	52,26	52,35
2. Konsumsi LNPR	4,19	3,28	6,77	0,46	0,45	0,46
3. Konsumsi Pemerintah	3,85	5,30	7,14	4,42	4,37	4,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,30	8,91	7,12	29,69	30,72	31,42
5. Perubahan Inventori	(90,46)	(5,64)	9,21	0,01	0,01	0,02
6. Total Net Ekspor:	5,30	(1,40)	3,74	12,75	12,19	11,32
6.a. Total Ekspor	2,32	9,57	3,47	72,83	74,44	73,19
6.b. Total Impor	2,01	10,77	3,44	60,08	62,25	61,87
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,28	5,73	5,81	100,00	100,00	100,00

Pengeluaran modal (PMTB) selama periode tahun 2016 - 2018 memberikan kontribusi cukup besar yaitu sekitar 29-31 persen, dengan kontribusi pada tahun 2016 sebesar Rp115,88

Triliun, Tahun 2017 sebesar Rp126,21 Triliun dan tahun 2018 sebesar Rp135,19 triliun.

Tabel 2.4
Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Banten, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	TAHUN 2019	
				MURNI	PERUBAHAN
1. PMTB adhk 2010	115,88	126,21	135,19	135,30	135,30
2. Pertumbuhan PMTB	6,3	8,91	7,12	7,44	7,44

Sumber : BPS dan Bappeda Provinsi Banten

proyeksi*

Sebagaimana proyeksi Bank Indonesia bahwa Perekonomian Provinsi Banten Tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,6 - 6,0% (YoY).

Tabel 2.5
Capaian Pertumbuhan Ekonomi 2017, 2018, TW I 2019, dan Target 2019 (persen)

URAIAN	REALISASI				TARGET RKPD 2019	
	2016	2017	2018	TW I 2019	MURNI	PERUBAHAN
Dunia	n.a.	3,7	3,5	n.a.	3,6	n.a.
Nasional		5,07	5,17	5,07	5,3	n.a.
Banten	5,28	5,73	5,81	5,42	6,2	5,6-6,0

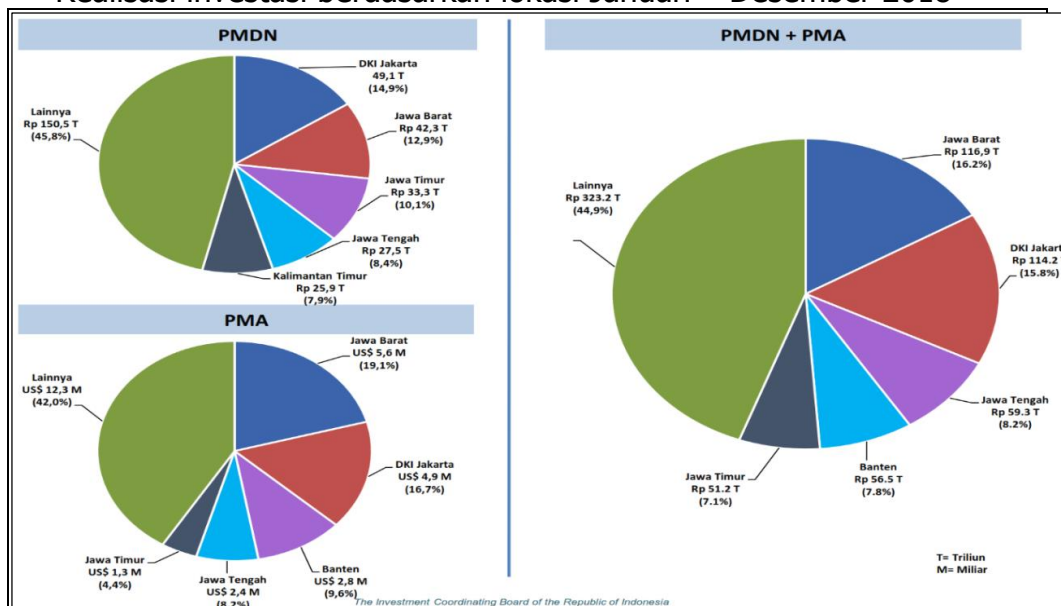
2.1.5. PENANAMAN MODAL

Perkembangan perekonomian PMA dan PMDN di Provinsi Tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa Provinsi Banten masih sangat menarik bagi Investor. Sektor yang sangat diminati oleh investor yaitu:

- 1) Listrik, gas, dan air sebesar ;
- 2) Transportasi, Pergudangan, dan telekomunikasi;
- 3) Pertambangan;

- 4) Pengolahan makanan; dan
- 5) Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran.

Gambar 2.7
Realisasi investasi berdasarkan lokasi Januari – Desember 2018



Sumber: BKPM RI

Tabel 2.6
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Banten `
Tahun 2013- 2018

TAHUN	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (MILIAR RUPIAH)	PROYEK	INVESTASI (JUTA USD)
2016	496	12.426,3	2.161	2.912,1
2017	699	15.141,9	2.479	3.047,5
2018	718	18.637,56	1.895	2.827,3

Sumber: BKPM RI

Pada tahun 2018, PMDN Banten masuk peringkat enam setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk PMA, Provinsi Banten masuk pada peringkat tiga setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Secara kumulatif sepanjang Januari-Desember 2018,

realisasi investasi mencapai Rp 56,5 triliun dengan kurs rupiah 13.400 per USD.

Investasi pada tahun 2019 diperkirakan tetap tumbuh, seiring dengan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur serta perbaikan birokrasi perizinan dan penanaman modal. Berkurangnya ketidakpastian global seiring stance the federal reserves Amerika Serikat yang kemungkinan besar tidak menaikkan suku bunganya pada tahun 2019 diperkirakan akan mendorong minat investor asing untuk berinvestasi di negara negara emerging markets termasuk Indonesia. Realatif menurunnya ketidakpastian keuangan global serta kondisi ekonomi nasional yang membaik, turut mendorong Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Banten.

Berlanjutnya program perbaikan birokrasi perizinaian dan penanaman modal atau *Online Single Submission* (OSS) yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan angka *ease of doing business* diharapkan akan meningkatkan daya Tarik investor asing ke Indonesia. Pada tahun 2018 telah berlangsung pembangunan beberapa proyek besar oleh Pemerintah dan juga sector swasta di Provinsi Banten. Penataan Kawasan Kesultann Banten diharapkan akan menambah kontribusi PDRB. Terdapat beberapa faktor resiko yang harus diwaspadai dan dapan menahan investasi. Salah satu factor resiko yang menentukan di pasar keuangan adalah masih adanya kemungkinan dinaikkannya th Fed Fund Rate oleh Federal Reserve Amerika Serikat di 2019. Kebijakan tersebut akan mendorong penguatan dolar AS.

2.1.6. INFLASI

Laju inflasi tahun kalender tercatat sebesar 0,35 persen, sedangkan inflasi "Year on Year" (IHK Februari 2019 terhadap Februari 2018) sebesar 3,30 persen. Kemudian inflasi "Year on Year" (IHK Maret 2019 terhadap Maret 2018) tercatat sebesar 2,97 persen.

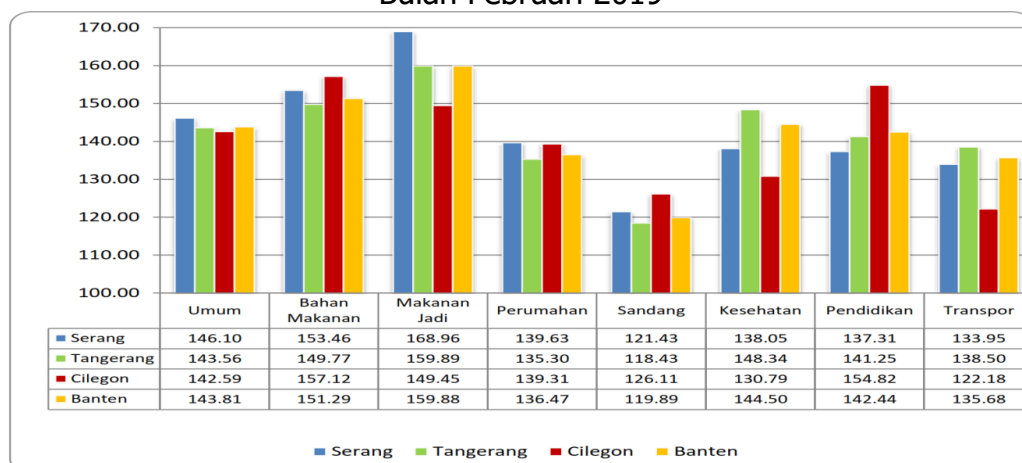
Tabel 2.7
IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten
Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Maret 2019 (2012= 100)

Kelompok Pengeluaran (1)	IHK Maret 2018 (2)	IHK Februari 2019 (3)	IHK Maret 2019 (4)	Inflasi Maret 2019 *) (5)	Laju Inflasi Tahun 2019 **) (6)	Inflasi "Year on Year" ***) (7)
U M U M	139,66	143,70	143,81	0,08	0,43	2,97
1. Bahan Makanan	151,79	152,16	151,29	-0,57	-0,74	-0,33
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	154,71	159,28	159,88	0,38	1,26	3,34
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	131,10	136,39	136,47	0,06	1,05	4,10
4. Sandang	115,42	119,84	119,89	0,04	0,45	3,87
5. Kesehatan	137,23	144,19	144,50	0,22	0,27	5,30
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	136,43	142,59	142,44	-0,11	0,10	4,41
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	131,25	134,90	135,68	0,57	0,25	3,37

Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Banten berturut-turut sebagai berikut: kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,08 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,02 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen, kelompok sandang sebesar 0,00 persen sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dan kelompok bahan makanan masing-masing

sebesar -0,01 persen dan -0,11 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi selama bulan Maret 2019 antara lain bawang merah, tahu mentah, angkutan udara, pizza, bawang putih, bawal, Mujair dan gurame. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga paling banyak antara lain adalah tomat buah, buncis, cabe merah, daging ayam ras, cabe rawit dan kamera.

Gambar 2.8
Perkembangan IHK Kota Serang, Tangerang, Cilegon dan Banten
(2012=100)
Bulan Februari 2019



Sumber: BPS Provinsi Banten

Tabel 2.8
Perbandingan IHK, Inflasi/Deflasi dan Laju Inflasi 26 Kota
Di Pulau Jawa dan Banten Bulan Maret 2019

Kota	IHK Maret 2018	IHK Maret 2018	IHK Maret 2019	Inflasi Maret 2019 (*)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2019 (**)	Inflasi Year on Year (**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jakarta	132,14	135,25	136,12	0,14	0,64	3,01
2. Bogor	133,48	136,73	137,09	0,28	0,26	2,70
3. Sukabumi	131,7	134,06	134,35	0,04	0,22	2,01
4. Bandung	131,24	134,48	134,53	0,03	0,04	2,51
5. Cirebon	128,11	129,98	130,27	0,18	0,22	1,69
6. Bekasi	129,57	132,13	133,26	0,01	0,86	2,85
7. Depok	130,68	132,93	133,45	0,24	0,39	2,12
8. Tasikmalaya	130,96	132,23	132,67	0,03	0,33	1,31
9. Cilacap	135,58	137,73	138,27	0,32	0,39	1,98
10. Purwokerto	129,19	131,87	131,99	0,19	0,09	2,17

	Kota	IHK Maret2018	IHK Maret2018	IHK Maret2019	Inflasi Maret 2019 (*)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2019 (**)	Inflasi Year on Year (**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	Kudus	138,9	140,92	141,29	0,23	0,26	1,72
12.	Surakarta	127,76	129,30	130,05	0,29	0,58	1,79
13.	Semarang	130,71	132,70	132,95	0,34	0,19	1,71
14.	Tegal	128,62	131,35	131,44	0,20	0,07	2,19
15.	Yogyakarta	129,23	131,81	132,60	0,26	0,60	2,61
16.	Jember	127,72	130,62	130,53	-0,06	-0,07	2,20
17.	Banyuwangi	127,62	128,96	129,58	0,17	0,48	1,54
18.	Sumenep	128,12	130,78	130,62	-0,07	-0,12	1,95
19.	Kediri	127,41	129,27	129,56	0,16	0,22	1,69
20.	Malang	132,38	134,99	135,63	0,36	0,47	2,46
21.	Probolinggo	127,59	129,77	129,59	-0,12	-0,14	1,57
22.	Madiun	129,76	132,09	132,59	0,14	0,38	2,18
23.	Surabaya	132,35	135,24	135,73	0,15	0,36	2,55
24.	Tangerang	139,38	143,08	143,56	0,01	0,34	3,00
25.	Cilegon	138,85	141,62	142,59	0,37	0,68	2,69
26.	Serang	141,71	145,19	146,10	0,15	0,63	3,10
27.	BANTEN	139,66	143,70	143,81	0,08	0,43	2,97

Tabel 2.9
Proyeksi Inflasi Provinsi Banten Tahun 2019-2020 (%)

INDIKATOR	CAPAIAN			TARGET 2019	
	2017	2018	TW I 2019	MURNI	PERUBAHAN
Nasional	3,30	3,23	n.a.	2,5 – 4,5	2,5 – 4,5
Banten	3,89	3,49	2,97	3,30 –	3,30 – 3,7

Sumber : BPS Provinsi Banten dan angka proyeksi Bappeda Provinsi Banten

2.1.7. ICOR

Nilai ICOR Total berdasarkan perhitungan PDRB ADHK 2010 pada Tahun 2018 PDRB Provinsi Banten tercatat sebesar 433,88 Triliun rupiah dengan Pertumbuhan sebesar 5,81 persen dari tahun sebelumnya. Pembentukan Modal Tetap Bruto dan inventori sebesar Rp 135,30 Triliun sehingga ICOR Provinsi Banten sebesar 5,36. Yang artinya untuk melakukan 1 investasi diperlukan modal sebesar 5,36. Kondisi Ideal yaitu pada ICOR pada skala 2,0 – 3,0. Hal ini juga menggambarkan bahwa Penciptaan Lapangan Kerja di Provinsi Banten masih didominasi oleh Investasi Padat Modal bukan Padat Karya.

2.1.8. KETENAGAKERJAAN

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 6,142 juta orang, naik 53.916 orang dibanding Februari 2018. Meningkatnya jumlah angkatan kerja, tidak disertai dengan naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang justru mengalami penurunan sebesar 0,87 poin. Ini disebabkan oleh adanya pergeseran penduduk dari angkatan kerja ke bukan angkatan kerja. Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 6.947 orang, sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun menjadi 7,58 persen pada Februari 2019.

Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,65 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 5,676 juta orang, bertambah 60.863 orang dari Februari 2018. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Perdagangan (4,53 persen poin), Konstruksi (1,34 persen poin), dan Jasa Pendidikan (1,00 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Pertanian & Pertambangan (2,67 persen poin); Industri Pengolahan (1,52 persen poin); serta Jasa Lainnya (1,24 persen poin). Sebanyak 2,46 juta orang (43,41 persen) bekerja di kegiatan informal. Selama setahun terakhir (Februari 2018-Februari 2019), pekerja informal turun sebesar 1,34 persen poin. Persentase tertinggi pada Februari 2019 adalah pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 78,18 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan jam kerja 1-7 jam memiliki persentase yang paling

kecil, yaitu sebesar 1,24 persen. Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu (14,88 persen) dan pekerja setengah penganggur (5,61 persen).

Tabel 2.10
Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan
Provinsi Banten, Februari 2017 – Feb 2019

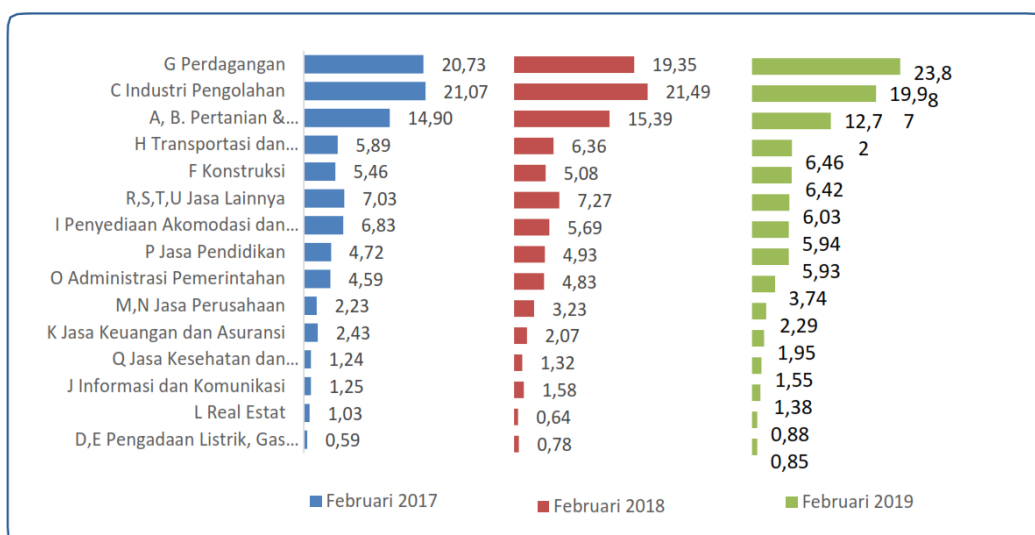
Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2017	Februari 2018	Februari 2019	Perubahan 1 Tahun (Feb 2018-Feb 2019)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	persen
Penduduk Usia Kerja	8.878,6	9.078,5	9.279,8	201,3	2,22
Angkatan Kerja	5.969,3	6.088,1	6.142,0	53,916	0,89
Bekerja	5.507,0	5.615,4	5.676,2	60,863	1,08
Pengangguran	462,3	472,8	465,8	-6,947	-1,47
Bukan Angkatan Kerja	2.909,3	2.990,4	3.137,8	147,337	4,93
Sekolah	731,0	771,2	804,6	33,421	4,33
Mengurus Rumah Tangga	1.845,2	1.914,2	2.017,6	103,374	5,40
Lainnya	333,2	305,0	315,5	10,542	3,46
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,75	7,77	7,58	-0,18	
Perkotaan	7,48	7,47	7,45	-0,03	
Perdesaan	8,39	8,47	7,91	-0,56	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,23	67,06	66,19	-0,87	
Laki-Laki	84,39	84,24	83,20	-1,04	
Perempuan	49,43	49,25	48,55	-0,69	

Sumber : BPS Provinsi Banten

Penduduk yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2019 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 23,88 persen; Industri Pengolahan 19,97 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,36 persen. Dilihat berdasarkan tren lapangan pekerjaan selama Februari

2018-Februari 2019, lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Perdagangan (4,53 persen poin), Konstruksi (1,34 persen poin), dan Jasa Pendidikan (1,00 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Pertanian & Pertambangan (2,67 persen poin); Industri Pengolahan (1,52 persen poin); serta Jasa Lainnya (1,24 persen poin).

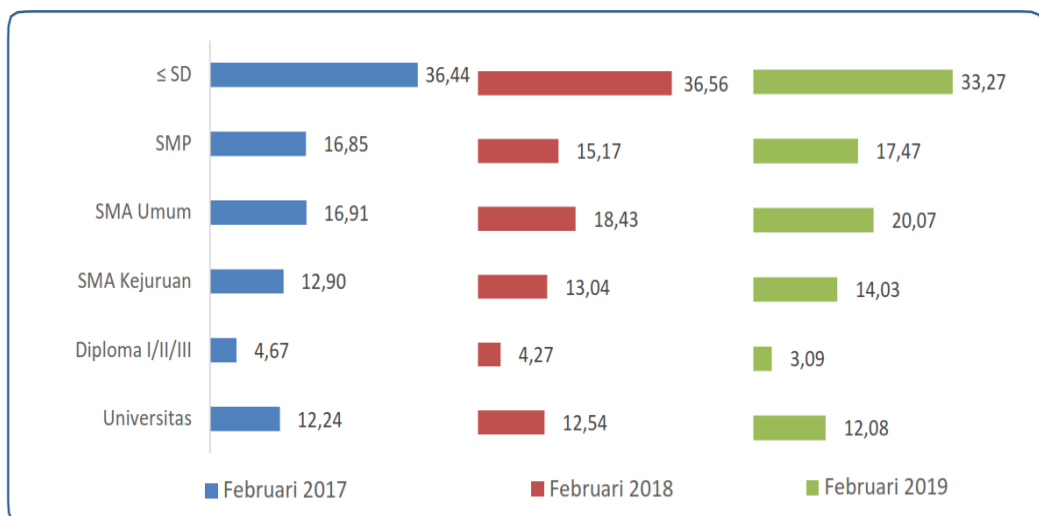
Gambar 2.9
Penduduk yang bekerja menurut status Lapangan Pekerjaan Utama
Februari 2017 - 2019



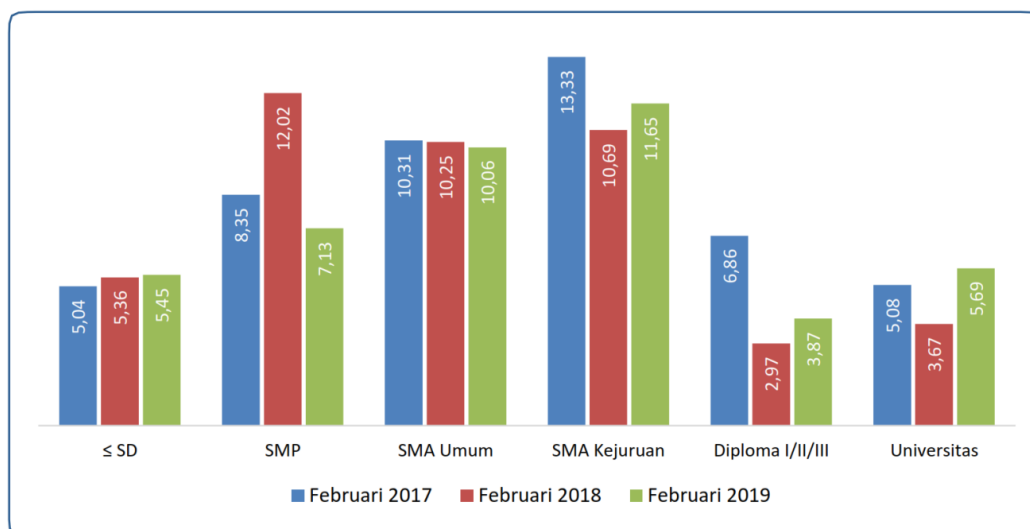
Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2019 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 1,89 juta orang (33,27 persen), SMA sebanyak 1,14 juta orang (20,07 persen), SMP sebanyak 991,48 ribu orang (17,47 persen), dan SMK sebanyak 796,34 ribu orang (14,03 persen). Sementara itu, penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) ada sebanyak 861,11 ribu orang

(15,17 persen) mencakup 175,33 ribu orang berpendidikan Diploma I/II/III dan 685,77 ribu orang berpendidikan Universitas Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja yang meningkat adalah mereka yang berpendidikan SMP (2,30 persen poin), SMA (1,64 persen poin), dan SMK (0,99 persen poin). Sementara penurunan persentase terutama pada penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (3,29 persen poin), Diploma (1,18 persen poin), dan Universitas (0,46 persen poin).

Gambar 2. 10
Pesentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang
ditamatkan Februari 2017 – Februari 2019



Gambar 2.11
Tingkat Pengangguran menurut Pendidikan
di Provinsi Banten, Februari 2017 - Feb 2019 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Banten

Tabel 2. 11
Realisasi Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2018, Prediksi Tahun 2019, dan Proyeksi Tahun 2020

INDIKATOR	2017	2018	TW I 2019	TARGET	
				MURNI	PERUBAHAN
Nasional	5,50	5,34	5,01	4,80 – 5,20	4,8 – 5,1
Banten	9,28	8,52	7,58	8,20	7,5 – 8,20

2.1.9. KEMISKINAN

Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2018 sebesar 5,25 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,24 persen. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 7,38 ribu orang dari 661,36 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 668,74 ribu orang pada September 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret 2018 sebesar

4,38 persen turun menjadi 4,24 persen pada September 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 sebesar 7,33 persen naik menjadi 7,67 persen pada September 2018. Selama periode Maret 2018 - September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 11,67 ribu orang (dari 393,80 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 382,13 ribu orang pada September 2018), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 19,05 ribu orang (dari 267,55 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 286,60 ribu orang pada September 2018). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan tercatat sebesar 71,60 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 71,66 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan September 2018 di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, roti serta kopi bubuk dan kopi instan (sachet). Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah sama yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.

Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan September 2018 mencapai 5,25 persen. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2018, maka selama enam bulan terjadi peningkatan sebesar 0,01 poin (dari posisi 5,24 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sedangkan di daerah perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 4,38 menjadi 4,24 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,33 pada Maret 2018 menjadi 7,67 pada September 2018. Sejalan dengan kenaikan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama bertambah sebanyak 7,38 ribu orang dari 661,36 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 668,74 ribu orang pada bulan September 2018.

Tabel 2.12
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2018 - September 2018

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2018	393,80	4,38
September 2018	382,13	4,24
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2018	267,55	7,33
September 2018	286,60	7,67
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>		
Maret 2018	661,36	5,24
September 2018	668,74	5,25

Sumber : BPS Provinsi Banten

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2002 - 2018

Secara umum, pada periode 2002–2018 tingkat kemiskinan di Banten cenderung menurun baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada tahun 2006, September 2013, Maret 2015, September 2017 dan September 2018. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Gambar 1 menyajikan perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2002 sampai dengan September 2018.

Perubahan Garis Kemiskinan September 2018, Garis Kemiskinan di gunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. perkembangan Garis Kemiskinan pada periode Maret-September 2018. Selama periode Maret-September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,42 persen, yaitu dari Rp431.069,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp450.108,- per kapita per bulan pada September 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan GKM terhadap GK pada September 2018 adalah sebesar 71,60

persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan Maret 2018 yang sebesar 71,66 persen.g

Tabel 2.13
Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah,
Maret 2018 - September 2018

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2018	316.089	132.429	448.518
September 2018	331.096	137.477	468.572
Perubahan (%)	4,75	3,81	4,47
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2018	293.446	96.862	390.309
September 2018	301.349	104.616	405.965
Perubahan (%)	2,69	8,01	4,01
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>			
Maret 2018	308.915	122.153	431.069
September 2018	322.256	127.852	450.108
Perubahan (%)	4,32	4,67	4,42

Sumber : BPS Provinsi Banten

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terkait dengan kesejahteraan penduduk miskin. Pada periode Maret-September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan IndeksKeparahan Kemiskinan (P2) keduanya mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,822 pada Maret 2018 menjadi 0,908 pada September 2018. Demikian pula IndeksKeparahan Kemiskinan naik dari 0,196 menjadi

0,250 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Tabel 2.14
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banten Menurut Daerah, Maret 2018 - September 2018

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2018	0,692	1,143	0,822
September 2018	0,684	1,449	0,908
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2018	0,162	0,278	0,196
September 2018	0,157	0,475	0,250

Dengan dilaksanakannya Program Pembangunan Provinsi Banten yang *Pro Poor* seperti, Pembangunan Rumah Layak Huni, Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Program Pendidikan Gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKH Negeri serta Pemberian Hibah BOSDA Kepada Sekolah Swasta, Pembiayaan Masyarakat Miskin, Pembangunan Rumah Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh, dan juga program bantuan social berupa Jamsosratu diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap Pengurangan kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 15
Realisasi penurunan Kemiskinan Tahun 2017, 2018, TW I 2019,
dan Target Tahun 2019

INDIKATOR	CAPAIAN			TARGET RKPD 2019	
	2017	2018	TW I 2019	MURNI	PERUBAHAN
Nasional	9,82	9,66	9,66	8,5 - 9,85	8,5 - 9,85
Banten	5,24	5,25	5,25	5,00	5,0 - 5,20

2.1.10. INDEK GINI

Indeks Gini merupakan alat ukur derajat ketidakmerataan atau ketimpangan pengeluaran penduduk. Indeks Gini Provinsi Banten pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Banten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,367. Angka ini turun 0,018 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,385. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,362 turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,386. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan justru meningkat dari 0,283 pada Maret 2018 menjadi 0,299 pada September 2018. Pada September 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,50 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,22 persen dan di daerah perdesaan sebesar 21,75 Persen.

2.1.11. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Sebagaimana dipublikasikan dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Banten oleh Bank Indonesia,

Periode Februari 2019 bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten secara konsisten mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari IPM Nasional. Namun demikian secara spasial terlihat lebarnya perbedaan antara IPM di Tangerang Raya dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang mencerminkan masih adanya kesenjangan kualitas hidup masyarakat antara wilayah Banten Utara dengan Banten.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia yang menunjukkan akses penduduk terhadap hasil pembangunan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya di suatu wilayah.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Dimensi Pengetahuan dicerminkan oleh indikator Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah. Sementara dimensi Standar Hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan.

Pada tahun 2017, IPM Banten telah mencapai 71,42, atau meningkat 0,46 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 70,96. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2017 mengalami perlambatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,65 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 0,98 persen. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk

komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan yang terendah untuk komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Adapun nilai atau capaian UHH, Harapan Lama Sekolah (HLS), RLS, dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, masing-masing 69,49 tahun, 12,78 tahun, 8,53 tahun, dan 11,7 juta rupiah. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada seluruh wilayah, dengan IPM tertinggi dan terendah tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (80,84) dan Kabupaten Lebak (62,95)

Pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). **Pada tahun 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95**, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 mengalami akselerasi atau percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2018, masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi”. Kategori “Tinggi” tersebut, diperoleh Banten sejak tahun 2015. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), sedangkan yang terendah pada komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Adapun nilai atau capaian UHH 69.64 Tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,85 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,62 tahun, dan PKP 12,0 juta rupiah. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada seluruh

wilayah, dengan IPM tertinggi dan terendah tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (81,17) dan Kabupaten Lebak (63,37).

Pencapaian IPM dan salah satu komponen penyusun yaitu Rata-rata Lama Sekolah dapat menjadi gambaran bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pemerataan pembangunan ke wilayah Selatan yang saat ini juga masih menjadi daerah tertinggal.

Tabel 2.16
Capaian dan Target IPM Provinsi Banten Tahun 2017-2020

INDIKATOR	CAPAIAN		TARGET RKPD TAHUN 2019	
	2017	2018	MURNI	PERUBAHAN
Nasional	70,81	71,5	71,98	71,98
Banten	71,42	71,95	72,20	72,20

Dengan memperhatikan Target dan Capaian Makro Ekonomi Secara Nasional dan Capaian Makro Ekonomi Tahun-tahun sebelumnya, serta Berita Acara Rapat Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Daerah antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Daerah Provinsi telah menyepakati Kebijakan Makro Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2020, dengan target sebagai berikut :

NO	INDIKATOR EKONOMI	TARGET 2019	
		MURNI	PERUBAHAN
1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	72,20	72,20
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2	5,6-6,0
3.	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,0	5,0 - 5,20
4.	Persentase Pengangguran Terbuka (%)	8,2	7,5 – 8,20
5	Gini Ratio	0,36 - 0,37	0,36 - 0,37

2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA 2019 berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan evaluasi atas Pendapatan Daerah pada semester I Tahun 2019, Pendapatan daerah khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan penyesuaian target. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Daerah/Bukan Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum tidak mengalami Perubahan. Selanjutnya untuk Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sehubungan dengan adanya penerimaan bantuan dari Pemerintah Jawa Timur dan sumbangan masyarakat atas bencana tsunami Banten.

Pendapatan Daerah target sebelum perubahan sebesar Rp 11.831.983.759.800,00 berkurang 1,37% atau sebesar Rp(161.772.221.213,00) sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp 11.670.211.538.587,00. Perubahan Target Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah, sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp 7.344.821.272.800,00 berkurang sebesar 2,29% atau sebesar Rp

(168.162.701.134,00) sehingga setelah Perubahan menjadi sebesar Rp 7.176.658.571.666,00. Komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp6.967.729.412.400,00 berdasarkan prognosis semester I Tahun 2019 penerimaan dari pajak daerah di prediksi berkurang sebesar 2,87% atau sebesar Rp(200.000.000.000,00) sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp6.767.729.412.400,00.
- 2) Retribusi Daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp 18.569.771.200,00 meningkat 2,87 % atau sebesar Rp532.062.000,00 sehingga target setelah perubahan menjadi sebesar Rp19.101.833.200,00.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp55.300.000.000,00 tidak mengalami perubahan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp303.222.089.200,00 meningkat 10,32% atau sebesar Rp 31.305.236.866,00 sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp 334.527.326.066,00,00.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp4.481.092.487.000,00. Pada Perubahan APBD TA 2019 tidak mengalami perubahan. Adapun rincian komponen dana perimbangan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp711.779.997.000,00
- 2) Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan target, yaitu tetap sebesar Rp1.140.003.353.000,00
- 3) Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan target, yaitu tetap sebesar Rp2.629.309.137.000,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pendapatan Daerah dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu dari Pendapatan Hibah, sebelum perubahan sebesar Rp6.070.000.000,00 meningkat 105% atau sebesar Rp6.390.479.921,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp12.460.479.921,00. Penambahan target penerimaan Perubahan APBD TA 2019 berasal dari Hibah dari PT Jasa Raharja sebesar 6.070.000.000,00, Hibah Pemerintah Jawa Timur sebesar Rp5.000.000.000, dan sumbangan masyarakat dalam rangka peduli Bencana Tsunami Banten sebesar Rp1.390.479.921,00.

Rincian Perubahan Pendapatan Daerah TA 2019 sebagai berikut :

TABEL 2.17
PENDAPATAN DAERAH PADA PERUBAHAN APBD TA 2019

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERSEN
4	PENDAPATAN	11.831.983.759.800	11.670.211.538.587	(161.772.221.213)	(1,37)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.344.821.272.800	7.176.658.571.666	(168.162.701.134)	(2,29)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.967.729.412.400	6.767.729.412.400	(200.000.000.000)	(2,87)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.569.771.200	19.101.833.200	532.062.000	2,87
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.300.000.000	55.300.000.000	-	-
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	303.222.089.200	334.527.326.066	31.305.236.866	10,32
4.2					
4.2.1	DANA PERIMBANGAN	4.481.092.487.000	4.481.092.487.000	-	-
4.2.2	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	711.779.997.000	711.779.997.000	-	-
4.2.3	Dana Alokasi Umum	1.140.003.353.000	1.140.003.353.000	-	-
4.3	Dana Alokasi Khusus	2.629.309.137.000	2.629.309.137.000	-	-
4.3.1					
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.070.000.000	12.460.479.921	6.390.479.921	105,28
	Pendapatan Hibah	6.070.000.000	12.460.479.921	6.390.479.921	105,28

2.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Dengan mempertimbangkan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan semester I, serta dalam rangka percepatan pencapaian target-target kinerja pembangunan, serta upaya peningkatan pelayanan publik, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap pos-pos Belanja Daerah. Penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Daerah dilakukan untuk Pemenuhan belanja yang bersifat wajib mengikat berupa belanja pegawai dan kebutuhan rutin untuk melaksanakan tugas dan fungsi

pemerintahan, memanfaatkan hasil efisiensi belanja, optimalisasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, serta penambahan target kinerja pada beberapa perangkat daerah yang harus dilaksanakan.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan belanja Daerah pada P-APBD TA 2019, antara lain:

1. Belanja Tidak Langsung

- a. Pengalokasian anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai selama 1 (satu) tahun;
- b. Optimalisasi anggaran hibah berupa pengurangan hibah kepada Pemerintah dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Pengalokasian anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Pengalokasian anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Serang sehubungan dengan adanya penerimaan bantuan peduli bencana tsunami dari Pemerintah Jawa Timur dan Sumbangan Masyarakat;
- e. Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga untuk penggunaan SiLPA yang harus digunakan pada tahun berjalan dan pengadaan hunian tetap paska bencana Tsunami.

2. Belanja Langsung

- a. Penganggaran Dana BOS yang harus disalurkan pada Tahun 2019;

- b. Penambahan anggaran dana BOS SMK sehubungan dengan adanya kenaikan tariff;
- c. Penganggaran Belanja Operasional pada CMBBS, dan mebelair sehubungan dengan penambahan volume rombongan belajar pada SMA dan SMK Tahun 2019;
- d. Penganggaran Dana BLUD yang harus dimanfaatkan pada Tahun 2019 untuk pelayanan kesehatan serta penyesuaian belanja BLUD yang berkaitan dengan penetapan target pendapatan BLUD;
- e. Penambahan anggaran jaminan kesehatan dalam rangka pelaksanaan *Universal Health Coverage* (UHC);
- f. Pembangunan gedung strategis;
- g. pengadaan lahan untuk hunian tetap, sarana Fasos, dan Fasum;
- h. Penganggaran kegiatan bidang Kepemudaan dan Olah raga;
- i. Pengadaan Lahan Pusat Distribusi Provinsi;
- j. Penataan Simpang Gondrong Tangerang (Jln Hasyim Ashari) dan Penataan Taman depan KP3B

Belanja Daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp12.154.531.396.800,00 meningkat sebesar 3,82% atau Rp464.636.284.675,00 sehingga Belanja Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp12.619.167.681.475,00. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp7.626.033.770.600,00 meningkat sebesar 4,61% atau Rp351.744.522.875,00 sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp7.977.778.293.475,00. Adapun uraian belanja tidak langsung dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp 2.218.718.430.000,00 meningkat 13,09% atau Rp290.413.356.875,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.509.131.786.875,00.
- b. Belanja Hibah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.310.418.836.000,00 berkurang 2,04% atau sebesar Rp(47.035.000.000,00) sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.263.383.836.000,00.
- c. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp105.979.000.000,00 tidak mengalami perubahan.
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.502.794.028.200,00 meningkat 4,66% atau sebesar Rp116.616.166.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.619.410.194.200,00;
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik, sebelum perubahan

direncanakan sebesar Rp432.693.476.400,00 tidak mengalami perubahan.

- f. Belanja Tidak Terduga sebelum perubahan ditargetkan sebesar sebesar Rp55.430.000.000,00 berkurang 14,88% dari target yang direncanakan sebesar Rp(8.250.000.000,00) sehingga setelah perubahan menjadi Rp47.180.000.000,00.

Rincian Perubahan Belanja Tidak Langsung sebagai berikut:

TABEL 2.18
BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA PERUBAHAN APBD TA 2018

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERSEN
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.626.033.770.600	7.977.778.293.475	351.744.522.875	4,61
5.1.1	Belanja Pegawai	2.218.718.430.000	2.509.131.786.875	290.413.356.875	13,09
5.1.4	Belanja Hibah	2.310.418.836.000	2.263.383.836.000	(47.035.000.000)	(2,04)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	105.979.000.000	105.979.000.000	-	-
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	2.502.794.028.200	2.619.410.194.200	116.616.166.000	4,66
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	432.693.476.400	432.693.476.400	-	-
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	55.430.000.000	47.180.000.000	(8.250.000.000)	(14,88)

2. Belanja Langsung

Belanja langsung sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp4.528.497.626.200,00 bertambah 2,49% atau sebesar Rp112.891.761.800,00 sehingga Belanja Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp4.641.389.388.000,00.

Selanjutnya Belanja Langsung pada Perubahan APBD TA 2019 sebagai berikut :

TABEL 2.19
BELANJA LANGSUNG PADA PERUBAHAN APBD TA 2019

KODE	URAIAN	APBD 2019	P-APBD TA 2019	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERSEN
5.2	BELANJA LANGSUNG	4.528.497.626.200	4.641.389.388.000	112.891.761.800	2,49
2.2.1	Belanja Pegawai	55.587.557.000	52.762.465.000	(2.825.092.000)	(5,08)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.785.054.925.626	2.882.495.971.223	97.441.045.597	3,50
2.2.3	Belanja Modal	1.687.855.143.574	1.706.130.951.777	18.275.808.203	1,08

2.4. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan Daerah yang ditargetkan pada P-APBD TA 2019 sebesar Rp11.670.211.538.587,00 sedangkan kebutuhan Belanja Daerah yang direncanakan mencapai Rp12.619.167.681.475,00 sebagaimana diuraikan di atas, terdapat defisit anggaran sebesar Rp(948.956.142.888,00). Defisit anggaran dimaksud akan ditutup melalui Penerimaan Pembiayaan Neto Daerah yaitu sebesar Rp948.956.142.888,00.

1. Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp453.547.637.000,00 meningkat 138,11% atau sebesar Rp626.408.505.888,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.079.956.142.888,00. Jumlah tersebut bersumber dari Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) TA 2018 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (*audited*).
2. Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp131.000.000.000,00 dialokasikan untuk

penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Banten. Rincian Pembiayaan Daerah pada P-APBD TA 2019 sebagai berikut :

TABEL 2.20
PEMBIAYAAN DAERAH PADA PERUBAHAN APBD TA 2019

KOD E	URAIAN	APBD 2019	P-APBD TA 2019	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERSEN
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	453.547.637.000	1.079.956.142.888,00	626.408.505.888	138,11
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	453.547.637.000	1.079.956.142.888,00	626.408.505.888	138,11
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	131.000.000.000	131.000.000.000,00	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	131.000.000.000	131.000.000.000,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	322.547.637.000	948.956.142.888,00	626.408.505.888	194,21

BAB III

PENUTUP

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan pada satu sisi dan penyesuaian dengan dinamika yang terjadi di Provinsi Banten serta kebijakan Pemerintah Pusat pada sisi lainnya, maka Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2019 yang mendasarkan pada program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Banten Tahun 2019.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya, KUPA dan PPAS Perubahan yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.